



Analisis kebijakan bantuan internasional bencana alam dalam dinamika ketahanan nasional dengan pendekatan delphi

YASSERINA RAWIE^{1*}, DAN M. SYARONI ROFII² 

¹ Producer MNC Media, PT MNC Televisi Network, News Production Department

² Departement of National Resilience, University of Indonesia

*Correspondence: yasserinar@gmail.com

Accepted Date: 29 Februari, 2024

ABSTRACT

This study uses the Delphi method to analyze the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of receiving international assistance for natural disasters in a country against the dynamics of national resilience. The Delphi method is one of the techniques used in mixed methods approaches. The researcher carried out several stages, from in-depth interviews, compiling variables for the questionnaire, and calculating the questionnaire result data to answer the research questions. The analysis will elaborate on several factors in national resilience: economy, politics, ideology, socio-culture, and defense and security. Based on the research results, four factors need to be taken into account by the government in responding to international natural disaster assistance: the type and scale of the disaster, assistance, the origin of the donor country, and the motives or interests of the donor country. It is advisable for the government to formulate policies related to its attitude to accept or reject international aid for natural disasters based on several possible conditions.

KEYWORDS: *Delphi method; donor country; foreign aid; national resilience; natural disasters*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman penerimaan bantuan internasional untuk bencana alam di suatu negara terhadap dinamika ketahanan nasional dengan menggunakan metode Delphi. Metode Delphi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pendekatan metode campuran. Peneliti melakukan beberapa tahapan, mulai dari wawancara mendalam, menyusun variabel untuk kuesioner, hingga menghitung data hasil kuesioner untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisisnya akan dijabarkan melalui sejumlah faktor ketahanan nasional, yaitu ekonomi, politik, ideologi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 4 faktor yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menyikapi bantuan bencana alam internasional, yaitu jenis dan skala bencana, bantuan, asal negara donor dan motif atau kepentingan negara donor. Bagi pemerintah, disarankan untuk merumuskan kebijakan terkait sikap pemerintah dalam menerima atau menolak bantuan internasional untuk bencana alam berdasarkan beberapa kemungkinan kondisi.

KATAKUNCI: bantuan luar negeri; bencana alam; ketahanan nasional; metode delphi; negara pendonor

Cite This Article:

Rawie, Y., & Rofii, M. S. (2024). Analisis kebijakan bantuan internasional bencana alam dalam dinamika ketahanan nasional dengan pendekatan Delphi. *Journal Of National Paradigm-Based Resilience Strategy*, 1(1), 15-29. <https://doi.org/10.61511/napbres.v1i1.2024.653>

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



1. Pendahuluan

Bencana alam merupakan salah satu faktor yang mengancam ketahanan nasional suatu negara (Pranowo, 2010), termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara yang rawan terkena bencana alam, karena letak Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau *Pacific Ring of Fire* (bnpb.go.id). Hal tersebut dikarenakan oleh letak geografis Indonesia yang berada di gugusan gunung api dan titik pertemuan sejumlah lempengan bumi. Menurut Undang-Undang (UU) RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Tren bencana alam di Indonesia meningkat sejak tahun 2010 dan didominasi oleh bencana banjir, longsor, dan puting beliung. Bencana dapat disebabkan oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Kerugian akibat bencana alam dapat diminalisir dengan kesiapsiagaan serta antisipasi bencana yang tepat guna.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2018 (<http://dibi.bnpb.go.id>), jumlah korban meninggal dunia dan hilang akibat bencana pada tahun 2018 merupakan paling besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sejak 2007. Jumlah kejadian bencana, kemungkinan hampir sama dengan jumlah bencana tahun 2016 dan 2017 yaitu masing-masing sebanyak 2.306 dan 2.391 kejadian bencana. Namun, dampak yang ditimbulkan akibat bencana pada 2018 sangat besar.



Grafik 1. Kejadian Bencana Alam Periode Tahun 2010 – 2018

Sumber: <http://dibi.bnpb.go.id>

Jumlah kejadian bencana alam di tahun 2017 menjadi tahun dengan jumlah kejadian bencana alam yang paling besar. Jumlah kejadian bencana alam dari tahun 2016 ke tahun 2017 meningkat sebanyak 560 kejadian. Bencana alam paling besar di tahun 2017 adalah bencana banjir, dengan peningkatan sebanyak 155 kejadian. Begitu juga kejadian bencana alam yang terjadi di tahun 2018 yang termasuk paling banyak diantara tahun-tahun sebelumnya, dengan jumlah kejadian sebanyak 3398 kali. Bencana alam yang terjadi pada tahun 2018 didominasi bencana hidrometeorologi. Bencana alam tersebut terdiri dari puting beliung sebanyak 605 kejadian, banjir 506 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 353 kejadian, longsor 319 kejadian, erupsi gunung api 55 kejadian, gelombang pasang dan abrasi 33 kejadian, gempa bumi yang merusak 17 kejadian, dan tsunami satu kali kejadian.

Bahkan, Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana alam kedua terbesar di Asia Pasifik, dalam rentang waktu 20 tahun terakhir yaitu sebanyak 191.164 jiwa (ESCAP & UNISDR, 2010). Selain itu, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa estimasi kerugian ekonomi yang diderita Indonesia mencapai US\$22,5 miliar. Salah satu permasalahan yang muncul di negara berkembang seperti Indonesia adalah keterbatasan dalam menangani bencana-bencana alam yang besar. Konteks dalam pembahasan ini adalah penanganan pasca bencana, yang diantaranya meliputi logistik bantuan bagi korban bencana dan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana (Hidayati, 2008). Dari keterbatasan tersebut, Puspita (2015) menjelaskan bahwa negara merupakan aktor utama yang memiliki kedaulatan untuk menanggulangi bencana alam, termasuk dalam hal menerima bantuan dari pihak luar atau *foreign aid* apabila negara yang bersangkutan tidak mampu menangani masalahnya sendiri.

Bantuan luar negeri merupakan transfer sumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah lain yang berbentuk barang atau dana. Sementara, Sogge (2002) mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai bentuk pengiriman komoditas, bantuan teknis, serta arus keuangan dari satu pihak ke pihak lain, baik dari pemerintah suatu negara ataupun dari institusi lain. Tujuan dari bantuan luar negeri adalah promosi pembangunan ekonomi terhadap satu negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan, dan dapat berupa hibah ataupun pinjaman dalam bentuk teknologi, uang, tenaga manusia, makanan dan ide. Bantuan luar negeri menjadi salah satu jalan keluar bagi permasalahan bencana di Indonesia, terutama bencana alam berskala besar atau yang berstatus bencana nasional. Meski demikian, ada kalanya pemerintah Indonesia menerima dan menolak bantuan luar negeri, seperti yang dijabarkan dalam Tabel 1.

Bencana yang menerima bantuan LN	Bencana yang tertutup dari bantuan LN
Gempa dan tsunami di Aceh & Sumbar (2004)	Gempa & tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumbar (2010)
Gempa di Bantul, Yogyakarta (2006)	Gunung Merapi meletus, Yogyakarta (2010)
Gempa di Padang, Sumbar (2009)	Gempa Lombok (2018)
Gempa di Palu & Donggala (2018)	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Pertimbangan pemerintah Indonesia untuk menerima atau menolak bantuan internasional memiliki kompleksitas tersendiri. Hal ini disebabkan ada sejumlah konsekuensi yang harus ditanggung oleh negara penerima bantuan internasional. Berdasarkan sejumlah literatur, bantuan internasional untuk bencana alam memiliki dinamika dalam setiap bidang ketahanan nasional, yakni ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Di satu sisi, bantuan internasional memang dapat meringankan sebuah negara yang terkena bencana alam.

Konsep ketahanan nasional memiliki makna yang luas dan menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan oleh setiap bangsa. Ketahanan Nasional didefinisikan sebagai kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, ke berlanjutan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya (Lemhannas, 2012). Muladi (2007) menjelaskan bahwa ketahanan nasional dimaknai dengan dua pendekatan yang berbeda, yakni pendekatan injiniring dan pendekatan sosial. Pendekatan injiniring memandang ketahanan nasional sebagai kemampuan suatu bangsa untuk kembali ke bentuk atau posisi semula pada saat terjadi tekanan dengan cepat. Pendekatan sosial memandang ketahanan nasional sebagai kemampuan suatu bangsa untuk merespon, beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan (Lemhanas, 2012).

Ketahanan nasional meliputi segenap bidang kehidupan yang dipetakan menjadi delapan gatra, yaitu: geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam sebagai gatra alamiah (natural determinants) serta ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan sebagai gatra sosial (social determinants) (Lemhannas, 2012). Begitu juga Usman (2003) membagi delapan gatra tersebut ke dalam dua kelompok, yakni aspek statis yang terdiri dari geografi, demografi dan sumber daya alam. Ketiga aspek statis tersebut dikenal dengan tri-gatra (tiga gatra). Sementara, aspek dinamis yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Kelima aspek dinamis tersebut dikenal dengan panca gatra (lima gatra). Gatra Sosial atau Pancagatra memiliki sifat yang aktif dan sangat dinamis. Pancagatra yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan merupakan wujud nyata dari perilaku hidup berbangsa dan bernegara untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan meningkatkan kualitas hidup.

Meski demikian, ternyata terdapat dampak negatif dari masuknya bantuan internasional jika dilihat dari berbagai bidang. Salah satu contoh negara yang memiliki pertimbangan besar untuk menerima bantuan asing saat negaranya dilanda bencana alam adalah India. Menurut Carneige dan Dolan (2015), India sebagai salah satu negara yang menolak bantuan internasional agar dinilai sebagai negara berkompeten, meskipun negara itu masih membutuhkannya. Palsunya, status donor menandai "superioritas dan kekuasaan" kepada donor, dan status penerima menandakan "inferioritas dan ketidakberdayaan", membuat negara-negara berusaha untuk keluar dari klasifikasi yang terakhir. Carneige dan Dolan (2015) menunjukkan bahwa bantuan internasional membuat penanganan bencana alam bukan sekedar bersifat kemanusiaan dan filantropisme, tapi juga bersifat politis. Hal tersebut dikarenakan setiap pendonor memiliki motif tertentu dalam memberi bantuan internasional.

Pertimbangan yang diambil para pengambil keputusan untuk menerima atau menolak bantuan internasional untuk korban bencana alam memiliki dinamika tersendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Peterson (2017) serta Carneige dan Dolan (2015), sebuah negara mengambil pertimbangan yang bersifat politis ketika memutuskan untuk menerima atau menolak bantuan dari negara lain. Dari segi ekonomi, Puspita (2015) menjelaskan bahwa suatu negara bisa menerima bantuan dari pihak luar apabila negara tersebut secara ekonomi tidak mampu menangani masalahnya sendiri. Sementara dari sisi pertahanan dan keamanan, Fachrudin (2007) menjelaskan bahwa bantuan militer asing dalam penanggulangan bencana alam berpotensi melanggar undang-undang pertahanan yang ada di suatu negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang bantuan internasional terhadap dinamika ketahanan nasional. Hal ini mengingat isu bencana menjadi isu yang sangat besar dan banyak terjadi di Indonesia. Analisis dengan dinamika ketahanan nasional dilakukan untuk memperkirakan kebijakan apa yang tepat diambil pemerintah terhadap bantuan internasional dalam jangka panjang. Dalam tulisan ini, peneliti menggunakan pendekatan Deplhi untuk menggali pendapat para ahli dari lima bidang ketahanan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis yaitu (1) kelebihan, kekurangan, ancaman dan peluang bantuan asing untuk bencana alam di berbagai bidang ketahanan nasional, dan (2) kebijakan yang bisa diambil pemerintah dalam menyikapi bantuan internasional bencana alam terhadap dinamika ketahanan nasional.

Bagian selanjutnya dari makalah ini disusun sebagai berikut. Metode penelitian dibahas di Bagian 2, diikuti hasil dan pembahasan di Bagian 3, dan kesimpulan di Bagian 4.

2. Metode

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian campuran atau *mixed method*. Pendekatan penelitian campuran adalah prosedur penelitian yang mengumpulkan atau mengombinasikan data kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan

sebuah analisis komprehensif terhadap masalah penelitian (Creswell, 2010). Jenis penelitian campuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian konkuren, atau penelitian dengan metode kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan dalam satu waktu. Analisis kebijakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Delphi, dengan tujuan untuk mencapai konsensus dari serangkaian proses penggalan informasi. Penelitian ini akan mengumpulkan pendapat dari pakar dari berbagai gatra sosial ketahanan nasional terkait dinamika ketahanan nasional dalam bantuan internasional untuk bencana alam.

Metode Delphi adalah proses yang dilakukan dalam kelompok untuk mensurvei dan mengumpulkan pendapat dari para ahli terkait topik tertentu. Metode ini berguna untuk menstrukturkan proses komunikasi kelompok sehingga prosesnya akan berjalan efektif, sehingga kelompok tersebut bisa menyelesaikan masalah. Salah satu kegunaan metode Delphi adalah untuk peramalan kebijakan. Peramalan kebijakan (*policy forecasting*) merupakan suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan kebijakan terdiri dari proyeksi, prediksi dan perkiraan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dan kuesioner pada periode November – Desember 2019. Kedua metode tersebut dilakukan terhadap sejumlah informan yang merupakan pakar di lima bidang ketahanan nasional, yaitu ekonomi, politik, sosial budaya, ideologi dan pertahanan keamanan. Daftar responden/informan dalam penelitian ini dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian

Bidang	Nama Pakar
Ekonomi	Dr. Raden Edi Prio Pambudi
Politik	Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
Sosial Budaya	Dr. Devie Rahmawati, S.Sos., M.Hum
Ideologi	Romo Benny Susetyo, M.Si.
Pertahanan Keamanan	Marsma Ade Dian S. Tambahan Respoden
Hubungan Internasional	Dr. Lili Yulyadi Arnakim
Ekonomi Politik	Dr. Tatok Sudiarto

Berdasarkan Tabel 2, jumlah pakar yang menjadi responden/informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Jumlah tersebut termasuk kategori sedang untuk jumlah responden dengan metode Delphi (Porter, 1980). Jumlah informan tersebut juga mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan metode Delphi, dengan jumlah informan yang hampir sama.

2.1. Proses penelitian kualitatif

Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait apa saja yang menjadi kelebihan, kekurangan, peluang dan ancaman dari bantuan internasional bencana alam di setiap gatra ketahanan nasional, berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para pakar. Dari hasil data kualitatif yang dikumpulkan, peneliti mengumpulkan variabel yang diajukan oleh para pakar dan membentuknya ke dalam kuesioner. Selanjutnya, wawancara mendalam juga dilakukan untuk menggali lebih jauh jawaban dari para pakar terhadap kuesioner yang telah diberikan. Selain mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, penulis juga mewawancarai seluruh informan dengan pertanyaan terbuka untuk memperkaya informasi terkait penelitian ini. Peneliti juga akan mengumpulkan data dari observasi selama proses pengumpulan data dan juga data sekunder dari beberapa instansi terkait.

2.2. Proses penelitian kuantitatif

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan kuesioner singkat kepada sejumlah ahli atau pakar yang berkaitan dengan penelitian ini. Kuesioner dibentuk dari variabel yang telah diajukan oleh para pakar dalam wawancara mendalam yang telah dilakukan sebelumnya. Penyebaran kuesioner bertujuan untuk mengetahui berbagai alternatif kebijakan yang diambil dalam menyikapi bantuan internasional bencana alam berdasarkan variabel yang ditentukan dan disetujui oleh para pakar. Hasil dari kuesioner dan wawancara akan saling memperkuat data yang didapatkan dalam penelitian ini.

Melalui tahapan-tahapan tersebut, peneliti akan memberikan kuesioner kepada para pakar atau ahli untuk meminta pendapat mereka terkait kekurangan, kelebihan, peluang dan ancaman terkait bantuan internasional bencana alam, dilihat dari lima gatra ketahanan nasional (ekonomi, politik, sosial budaya, ideologi dan hankam).

Skala pengukuran dalam penelitian ini merupakan skala Likert, dengan tujuan agar variabel yang diukur dapat dijabarkan menjadi indikator variabel (Sugiyono, 2011). Dalam kuesioner tersebut, informan akan mengisi masing-masing pertanyaan yang disediakan dengan besaran nilai 1 sampai 6. Keterangan untuk masing-masing skor adalah 1=sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=kurang setuju, 4=cukup setuju, 5=setuju, 6=sangat setuju. Penelitian ini menggunakan pengukuran sebanyak enam kategori untuk menghindari pernyataan netral dari responden. Jika responden menjawab dengan skor 1-3 berarti merekomendasikan untuk menolak bantuan internasional bencana alam, dan skor 4-6 berarti merekomendasikan untuk menerima bantuan internasional bencana alam.

Untuk perhitungan hasil kuesioner, peneliti membaginya ke dalam poin kuisisioner dengan skala ordinal dan skala nominal. Untuk hasil kuesioner dengan skala ordinal, peneliti akan melihat dari rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), serta nilai yang paling sering muncul (*modus*) dari masing-masing variabel dalam kuesioner penelitian. Selain itu, peneliti juga akan menghitung dari masing-masing item pertanyaan dan mengklasifikasikannya berdasarkan jawaban masing-masing responden yang merupakan pakar dari bidang yang berbeda-beda. Sementara, untuk pertanyaan dengan skala nominal, peneliti akan menghimpunnya ke dalam pengkategorian sederhana, sebagai rekomendasi untuk kebijakan terkait bantuan internasional bencana alam.

Pada proses pengambilan keputusan dalam metode Delphi terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai konsensus antar pakar. Syarat tersebut adalah nilai standar deviasi dari seluruh narasumber ahli $< 1,5$ dan nilai jangkauan *interquartile* seluruh narasumber ahli $< 2,5$. Jika kedua syarat tersebut terpenuhi maka terjadi konsensus atau disebut dengan konvergen. Namun, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka konsensus tidak tercapai atau disebut divergen.

3. Hasil dan Diskusi

Di Indonesia, pemerintah dapat menetapkan status bencana nasional terhadap bencana yang terjadi dalam skala besar, baik dalam skala kerusakan dan jumlah korban. Acuan bagi pemerintah untuk menetapkan bencana nasional diatur dalam Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (2). Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa penetapan status bencana nasional dilihat dari 5 (lima) indikator, yaitu jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Bencana nasional yang pernah terjadi di Indonesia di antaranya adalah gempa Flores pada tahun 1992 yang memakan korban jiwa 2.500 orang dan korban luka sebanyak 2.103 orang, tsunami Flores 1992 yang memakan korban jiwa sebanyak sekitar 2.400 orang dan merusak sebanyak 113 unit sarana dan prasarana, dan bencana tsunami di Aceh pada 2004 yang memakan korban jiwa sebanyak 165.791 orang,

korban luka 2.830 orang dan mengancurkan sekitar 179.000 rumah warga serta ribuan sarana dan prasarana (Nugroho, 2018).

3.1. Hasil pendapat pakar terhadap faktor-faktor pertimbangan bantuan internasional secara kualitatif

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, peneliti mengumpulkan sejumlah variabel penelitian yang diajukan oleh para informan. Peneliti menyederhanakannya menjadi empat variabel penelitian, yaitu jenis dan skala bencana, motif atau kepentingan pendonor, negara pemberi bantuan dan bentuk bantuan.

a. Hasil Keputusan Pakar Terhadap Skala Bencana Alam

Menerima bantuan bencana alam dengan skala kerusakan parah dan korban banyak

Bagian ini merupakan jawaban responden terkait sikap pemerintah dalam menerima bantuan bencana alam, dengan skala kerusakan parah dan jumlah korban yang banyak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala Likert yakni 1=sangat tidak setuju, 2= tidak setuju, 3=kurang setuju, 4=cukup setuju, 5= setuju, 6=sangat setuju.

Tabel 3. Hasil pendapat para pakar terkait menerima bantuan bencana alam dengan skala kerusakan parah dan korban banyak

Bentuk Bantuan	Narasumber Ahli							Rata-rata	St.Dev	IR	Evaluasi	
	1	2	3	4	5	6	7				Stdev	IR
Dana	5	6	4	5	5	6	6	5,3	0,8	1,0	kon	kon
Barang	5	6	4	5	5	6	6	5,3	0,8	1,0	kon	kon
Teknologi	5	5	4	5	6	6	6	5,3	0,8	1,0	kon	kon

Sumber: data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 3, sebagian besar responden setuju apabila pemerintah menerima bantuan internasional bencana alam dengan skala kerusakan yang parah dan jumlah korban jiwa dalam jumlah besar. Hasil rata-rata untuk bagian ini adalah 5,3 atau dalam skala setuju untuk menerima bantuan internasional bencana alam dalam bentuk dana, barang dan teknologi/fasilitas, khususnya untuk pembangunan infrastruktur.

Menerima Bantuan Bencana Alam dengan Skala Kerusakan Parah dan Korban Sedikit

Bagian ini merupakan jawaban responden terkait sikap pemerintah dalam menerima bantuan bencana alam, dengan skala kerusakan parah dan jumlah korban sedikit (di bawah 1000 orang). Jawaban responden terkait hal ini disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil pendapat para pakar terkait menerima bantuan bencana alam dengan skala kerusakan parah dan korban sedikit

Bentuk Bantuan	Narasumber Ahli							Rata-rata	St.Dev	IR	Evaluasi	
	1	2	3	4	5	6	7				Stdev	IR
Dana	5	4	4	4	4	5	5	4,4	0,5	1,0	kon	kon
Barang	5	5	0	4	4	5	5	4,0	1,8	1,0	div	kon
Teknologi	5	4	5	5	5	4	5	4,7	0,5	0,5	kon	kon

Keterangan:

Sumber: data diolah (2020)

Berdasarkan hasil kesepakatan para ahli yang ditunjukkan dengan nilai konvergensi dan divergen, terdapat satu narasumber ahli yang tidak mengemukakan pendapatnya terkait apakah bentuk bantuan barang diperlukan untuk bencana alam dalam skala kerusakan parah namun korban sedikit dibanding yang lainnya. Hal ini yang menyebabkan terjadi divergen. Namun Sebagian besar menyetujui bahwa bantuan barang tetap harus

diberikan walaupun korban sedikit. Sehingga dapat diputuskan bahwa bentuk bantuan menjadi prioritas untuk diterima adalah teknologi/fasilitas dengan nilai 4,7. Kemudian diikuti dengan bantuan berupa dana, dan barang/kebutuhan pokok dengan nilai 4,4. Dalam kondisi tersebut, pemerintah membutuhkan banyak sumber daya untuk pemulihan pasca bencana, khususnya untuk pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Menerima Bantuan Bencana Alam dengan Skala Kerusakan Ringan dan Korban Banyak

Bagian ini merupakan jawaban responden terkait sikap pemerintah dalam menerima bantuan bencana alam, dengan skala kerusakan ringan dan jumlah korban banyak (di atas 1000 orang). Jawaban responden terkait hal ini disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil pendapat para pakar terkait menerima bantuan bencana alam dengan skala kerusakan ringan dan korban banyak

Bentuk Bantuan	Narasumber Ahli							Rata-rata	St.Dev	IR	Evaluasi	
	1	2	4	5	6	7	Stdev				IR	
Dana	5	5	4	5	5	5	4,8	0,4	0,1	kon	kon	
Barang	5	5	4	3	5	5	4,5	0,8	0,8	kon	kon	
Teknologi	5	4	5	5	4	4	4,5	0,5	1,0	kon	kon	

Sumber: data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 5, bentuk bantuan yang menjadi prioritas untuk diterima adalah dana dengan nilai 4,4. Kemudian diikuti dengan bantuan berupa teknologi dengan nilai 4,3 dan barang dengan nilai 4,1. Dengan jumlah korban yang banyak, pemerintah dianggap memerlukan bantuan yang berbentuk materill dan tidak terlalu memerlukan bantuan yang berbentuk tentara dan relawan.

Menolak Bantuan Bencana Alam dengan Skala Kerusakan Ringan dan Korban Sedikit

Bagian ini merupakan jawaban responden terkait sikap pemerintah dalam menolak bantuan bencana alam, dengan skala kerusakan ringan dan jumlah korban sedikit (di bawah 1000 orang). Jawaban responden terkait hal ini disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil pendapat para pakar terkait menolak bantuan bencana alam dengan skala kerusakan ringan dan korban sedikit

Bentuk Bantuan	Narasumber Ahli							Rata-rata	St.Dev	IR	Evaluasi	
	1	2	3	4	5	6	7				Stdev	IR
Tentara	3	2	2	2	2	2	3	2,3	0,5	0,5	kon	kon
Relawan	3	0	2	0	3	2	3	1,9	1,3	2,0	kon	kon

Sumber: data diolah (2020)

Berdasarkan hasil rata-rata pendapat para pakar, bantuan yang paling disarankan untuk ditolak oleh pemerintah adalah bantuan berupa tentara. Dalam kondisi tersebut, pemerintah dianggap masih mampu untuk menyediakan sumber daya untuk para korban bencana alam dan pemulihan pasca bencana, tanpa bantuan dari negara lain.

b. Hasil keputusan pakar terhadap sikap pemerintah berdasarkan negara pendonor

Peneliti membagi tiga klasifikasi negara pemberi bantuan dalam pertanyaan yaitu negara yang berada satu kawasan dengan penerima, negara yang berada satu organisasi dengan penerima dan negara yang tidak satu kawasan dan satu organisasi dengan negara penerima. Sementara skala bencana alam yang ditanyakan yaitu bencana alam dalam skala besar (kerusakan parah dan jumlah korban banyak), dan skala ringan (kerusakan ringan dan jumlah korban sedikit). Selain itu, peneliti juga membagi pertanyaan di bagian ini ke dalam

beberapa bentuk bantuan, yakni bantuan berupa dana, barang/kebutuhan pokok, tentara, relawan dan teknologi/fasilitas.

Tabel 7. Hasil pendapat para pakar terkait sikap pemerintah dalam menerima bantuan bencana alam dari negara satu kawasan

Bencana Alam Skala Besar									
Bentuk Bantuan	1	2	3	4	5	6	7	T	Mean
Dana	5	6	4	4	5	6	6	36	5,1
Barang	5	6	4	4	5	6	6	36	5,1
Tentara	2	4	3	3	2	5	5	24	3,4
Relawan	2	4	4	4	3	4	6	27	3,8
Teknologi	5	5	5	4	5	6	6	36	5,1
Bencana Alam Skala Ringan									
Bentuk Bantuan	1	2	3	4	5	6	7	T	Mean
Dana	3	5	3	4	5	4	5	29	4,1
Barang	3	5	3	4	5	4	5	29	4,1
Tentara	2	3	3	3	2	2	4	19	2,7
Relawan	2	4	3	4	3	2	5	23	3,3
Teknologi	3	4	4	4	5	3	5	28	4

Sumber: data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 7, bentuk bantuan yang diprioritaskan untuk diterima oleh pemerintah adalah bantuan dalam bentuk dana, barang/kebutuhan pokok, relawan dan teknologi. Sementara, untuk bentuk bantuan berupa pasukan tentara, para pakar kurang setuju jika pemerintah menerimanya, karena tidak terlalu dibutuhkan dalam konteks bencana tertentu. Namun, dalam kasus bencana dengan skala kerusakan yang parah dan jumlah korban yang banyak, para responden menyarankan untuk menerima bantuan dalam bentuk apapun, termasuk pasukan tentara. Oleh karena itu, para pakar tidak terlalu mementingkan aspek asal negara pendonor, melainkan skala bencana dan jumlah korban dari suatu bencana alam.

Tabel 8. Hasil pendapat para pakar terkait sikap pemerintah dalam menerima bantuan bencana alam dari negara satu organisasi

Bencana Alam Skala Besar									
Bentuk Bantuan	1	2	3	4	5	6	7	T	Mean
Dana	5	6	5	4	4	6	6	36	5,1
Barang	5	6	5	4	4	6	6	36	5,1
Tentara	2	5	4	3	2	5	6	27	3,8
Relawan	2	5	4	4	3	4	4	19	2,7
Teknologi	5	5	5	4	4	6	6	35	5
Bencana Alam Skala Ringan									
Bentuk Bantuan	1	2	3	4	5	6	7	T	Mean
Dana	3	5	3	4	4	3	4	26	3,7
Barang	3	5	3	4	4	3	4	26	3,7
Tentara	2	3	2	3	1	1	4	16	2,3
Relawan	2	4	3	4	1	1	2	19	2,7

Teknologi	3	5	3	4	3	3	4	25	3,6
-----------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----

Sumber: data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 8, bentuk bantuan yang diprioritaskan untuk diterima oleh pemerintah adalah bantuan dalam bentuk dana, barang/kebutuhan pokok, relawan dan teknologi. Sementara, untuk bentuk bantuan berupa pasukan tentara, para pakar kurang setuju jika pemerintah menerimanya, karena tidak terlalu dibutuhkan dalam konteks bencana tertentu.

Tabel 9. Hasil Pendapat Para Pakar terkait Sikap Pemerintah dalam Menerima Bantuan Bencana Alam dari Negara di Luar Kawasan dan Organisasi

Bencana Alam Skala Besar									
Bentuk Bantuan	1	2	3	4	5	6	7	T	Mean
Dana	5	6	4	4	4	4	5	32	4,6
Barang	5	6	4	4	4	4	5	32	4,6
Tentara	2	4	2	3	1	3	5	20	2,8
Relawan	2	4	3	4	1	2	5	21	3
Teknologi	5	5	4	4	4	3	5	15	4,3
Bencana Alam Skala Ringan									
Bentuk Bantuan	1	2	3	4	5	6	7	T	Mean
Dana	3	5	3	4	2	2	4	23	3,3
Barang	3	5	3	4	2	2	4	23	3,3
Tentara	2	2	2	3	1	1	3	14	2
Relawan	2	4	3	4	1	1	4	19	2,7
Teknologi	3	4	3	4	2	1	4	21	3

Sumber: data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 9, bentuk bantuan yang diprioritaskan untuk diterima oleh pemerintah adalah bantuan dalam bentuk dana, barang/kebutuhan pokok, relawan dan teknologi. Namun, para pakar menganjurkan untuk tetap menerima bantuan berupa tentara dalam kasus bencana dengan skala kerusakan yang parah dan jumlah korban yang banyak.

- c. Hasil keputusan pakar terhadap sikap pemerintah berdasarkan motif negara pendonor

Dalam bagian ini, para pakar memberikan pendapat tentang motif apa yang harus diwaspadai, dibalik pemberian bantuan internasional bencana alam. Jawaban para responden terkait hal tersebut disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil pendapat para pakar terkait sikap pemerintah berdasarkan motif negara pendonor

Bidang	1	2	3	4	5	6	7	T	Mean
Politik	2	6	5	2	5	4	2	26	3,7
Eko	2	5	5	3	2	4	2	23	3,3
Ideo	2	3	4	2	5	3	1	20	2,8
Sosbud	5	3	4	2	5	3	1	23	3,7
Hankam	2	3	5	2	5	2	1	20	2,8
Total	13	20	23	11	22	16	7		
Mean	2,6	4	4,6	2,2	4,4	3,2	1,4		

Sumber: data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 10, masing-masing pakar menganggap bahwa terdapat ancaman di balik pemberian bantuan internasional bencana alam di bidangnya masing-masing. Hasil perhitungan kuesioner menunjukkan bahwa motif yang paling harus diwaspadai adalah motif politik dan sosial budaya. Motif politik biasanya berupa intervensi kebijakan, sementara sosial budaya berupa penyebaran budaya kepada masyarakat di negara lain. Kedua motif tersebut menjadi paling dominan dan paling dimungkinkan untuk disisipi dalam pemberian bantuan internasional bencana alam. Posisi ketiga motif yang paling harus diwaspadai adalah motif ekonomi, seperti intervensi kebijakan ekonomi atau mendapatkan keuntungan lewat pemberian bantuan yang berupa pinjaman lunak. Sementara itu, motif yang paling rendah tingkat ancamannya menurut keseluruhan perhitungan kuesioner adalah motif ideologi dan menguasai wilayah. Menurut para pakar, kedua motif tersebut sudah tidak relevan di era globalisasi dan era teknologi canggih seperti saat ini.

3.2. Rekomendasi kebijakan untuk menyikapi bantuan internasional bencana alam

Dalam bagian ini, para pakar menyebutkan sejumlah kondisi yang bisa menjadi prasyarat bagi pemerintah dalam memutuskan untuk menerima atau menolak bantuan internasional bencana alam. Jawaban para responden terkait prasyarat bagi suatu negara untuk menerima bantuan internasional bencana alam disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Prasyarat Menerima Bantuan Internasional Bencana Alam

Prasyarat	Jumlah Pakar
Negara tidak mampu menanggulangi/ kebutuhan mendesak	5
Skala bencana besar	3
Kebutuhan terhadap teknologi tertentu	2
Bantuan tanpa syarat/ berbentuk kemanusiaan	2
Sesuai dengan aturan hukum internasional	1
Bersifat transfer teknologi	1
Bantuan atas dasar persahabatan dan kawasan	1
Bantuan sesuai dengan konteks dan kondisi bencana	1

Sumber: data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 11, kondisi yang menjadi pertimbangan utama untuk menerima bantuan internasional bencana alam adalah kemampuan pemerintah dalam mengatasi bencana alam di wilayahnya. Prasyarat yang disebutkan dalam tabel telah disusun berdasarkan jumlah suara terbanyak dari para pakar. Prasyarat yang memiliki suara terbanyak menjadi prasyarat yang perlu menjadi prioritas bagi pemerintah untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerima bantuan internasional bencana alam. Prasyarat yang paling menjadi prioritas dengan suara pakar terbanyak adalah apabila negara tidak mampu menanggulangi/ kebutuhan mendesak.

Pertimbangan utama yang harus dipikirkan pemerintah dalam menerima bantuan internasional bencana alam adalah jumlah korban dan kerugian/kerusakan akibat bencana alam. Hal tersebut terkait dengan jenis serta skala bencana alam. Selain itu keterbatasan teknologi yang dimiliki suatu negara juga menjadi pertimbangan yang harus dipikirkan pemerintah dalam menerima bantuan internasional bencana alam. Pertimbangan selanjutnya untuk menerima bantuan internasional bencana alam adalah apabila bantuan diberikan tanpa syarat. Selain persyaratan tersebut, ada juga beberapa kondisi lainnya yang perlu dipertimbangkan untuk menerima bantuan internasional bencana alam, yaitu, bantuan yang sesuai dengan aturan hukum internasional, bantuan yang bersifat transfer teknologi, bantuan atas dasar persahabatan dan kawasan, serta bantuan yang sesuai dengan konteks dan kondisi bencana.

Tabel 12. Prasyarat untuk Menolak Bantuan Internasional Bencana Alam

Prasyarat	Jumlah Pakar
Ada kepentingan tertentu/ intervensi kedaulatan, pencucian uang, motif penyebaran budaya dan ideologi tertentu	5
Bantuan tidak sesuai kebutuhan/ produk kontroversial	2
Negara/pemerintah mampu menanggulangi sendiri	2
Tidak sesuai aturan internasional	1
Diberikan negara yang berseberangan dengan penerima	1
Berbeda ideologi	1

Sumber: data diolah (2020)

Prasyarat yang disebutkan dalam Tabel 12 telah disusun berdasarkan jumlah suara terbanyak dari para pakar. Prasyarat yang memiliki suara terbanyak menjadi prasyarat yang perlu menjadi prioritas bagi pemerintah untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menolak bantuan internasional bencana alam. Pertimbangan utama untuk menolak bantuan internasional bencana alam adalah apabila terdapat kepentingan tertentu dari negara pendonor. Kepentingan tersebut dapat berupa intervensi kedaulatan, motif penyebaran budaya dan penyebaran ideologi tertentu atau bahkan praktek pencucian uang. Kemudian, pemerintah sebaiknya menolak bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan para korban bencana alam dan produk-produk yang bertentangan dengan budaya masyarakat lokal. Selain itu, pemerintah sebaiknya menolak bantuan internasional bencana alam apabila masih mampu menanggulangnya sendiri. Selain persyaratan tersebut, ada juga beberapa kondisi lainnya yang perlu dipertimbangkan untuk menolak bantuan internasional bencana alam, yaitu pemberian bantuan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum internasional, serta bantuan yang diberikan oleh negara yang berseberangan dengan negara penerima atau negara yang berbeda ideologi. Dengan pendapat dari para pakar, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menolak bantuan internasional bencana alam adalah kepentingan dari negara pendonor, bentuk bantuan serta asal negara pendonor.

4. Kesimpulan

Ada berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menerima bantuan internasional bencana alam, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, ideologi dan pertahanan dan keamanan. Dari masing-masing aspek tersebut, perlu dilihat bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari keputusan untuk menerima atau menolak bantuan internasional bencana alam.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, terdapat sejumlah saran untuk kebijakan pemerintah dan untuk penelitian selanjutnya. Untuk pemerintah, disarankan untuk merumuskan kebijakan terkait sikap pemerintah untuk menerima atau menolak bantuan internasional bencana alam berdasarkan sejumlah kemungkinan kondisi yang terjadi. Kebijakan dalam menyikapi bantuan internasional bencana alam dapat dirumuskan ke dalam empat aspek, yakni jenis dan skala bencana, bentuk bantuan, motif atau kepentingan negara pendonor dan negara asal pendonor. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk bertindak di saat kondisi darurat atau saat terjadi bencana.

Sementara untuk penelitian selanjutnya bisa lebih diperdalam mengenai pengaruh meningkatnya intensitas bencana alam terhadap peningkatan bantuan internasional bencana alam yang masuk ke Indonesia. Selain itu, bisa juga dibandingkan peta bencana di setiap wilayah di Indonesia dan perbandingan jumlah bantuan internasional bencana alam yang diterima.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim IASSSF karena telah membantu penulisan artikel ini.

Kontribusi Penulis

Semua penulis berkontribusi penuh atas penulisan artikel ini.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan dari luar

Pernyataan Dewan Peninjau Etis:

Tidak berlaku.

Pernyataan Persetujuan yang Diinformasikan

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak berlaku.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan,

Open Access

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun. selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Referensi

- Carneige, A., & Dolan, L.R. (2021). The Effects of aid on recipients' reputations: Evidence from natural disaster responses. *The Review of International Organization*, 16: 495-519. <https://doi.org/10.1007/s11558-020-09393-y>
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ESCAP & UNISDR. (2010). *The Asia Pacific disaster report 2010: Protecting development gains*. Bangkok: ESCAP & UNISDR. https://www.unisdr.org/files/16132_asiapacificdisasterreport20101.pdf
- Fachrudin. (2007). *Laporan pengkajian hukum tentang mekanisme bantuan militer asing di Indonesia dalam penanggulangan bencana alam*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM.

- Hidayati, D. (2008). Kesiapsiagaan masyarakat: Paradigma baru pengelolaan bencana alam di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. III No. 1, 69-84. <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/164/196>
- Lemhannas RI. (2012). *Sistem dinamika pengukuran ketahanan nasional pengukuran ketahanan nasional dan simulasi kebijakan publik*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Nugroho, B.P. (2018, 22 Agustus). Infografis: Beda bencana nasional dan bukan bencana nasional. *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-4177366/infografis-beda-bencana-nasional-dan-bukan-bencana-nasional>
- Peterson, T.M. (2017). US disaster aid and bilateral trade growth. *Foreign Policy Analysis*, 13(1): 93-111. <https://doi.org/10.1093/fpa/orw046>
- Porter, M. E. (1980). *Competitive strategy: Techniques for analysing industries and competitors*. New York: The Free Press.
- Puspita, N.Y. (2015). Tanggung Jawab Negara Untuk Menerima Bantuan Kemanusiaan Saat Tanggap Darurat Bencana Alam. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(2), 208-215. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.2.2015.208-215>
- Sogge, D. (2002). *Give and Take: What's the Matter with Foreign Aid?* New York: Zed Books.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dan RnD*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, W. (2003). *Daya Tahan Bangsa*. Jakarta: Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia. <http://dibi.bnppb.go.id>

Biografi Penulis

YASSERINA RAWIE, Producer MNC Media, PT MNC Televisi Network, News Production Department.

- Email: yasserinar@gmail.com
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -

M. SYARONI ROFII, dosen Departemen Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia.

- Email: muhammadsyaroni@ui.ac.id
- ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7867-4871>
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -